

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Idiosinkratik Donald Trump dan Xi Jinping

2.1.1 Idiosinkratik Donald Trump

Karakteristik Donald Trump telah banyak dipelajari dari berbagai sudut pandang. Mcadams (2020) mengeksplorasi karisma Trump, keterampilan membuat kesepakatan, temperamen yang mudah berubah, pendekatan terhadap hubungan pribadi, narsisme, dan kemunculannya sebagai pemimpin otoriter yang unik dalam sejarah Amerika. (Nai et. all. 2019) menyoroti ciri-ciri kepribadian Trump, seperti ekstroversi yang tinggi, rendahnya keramahan, narsisme yang berlebihan, dan bahkan menyarankan kemungkinan diagnosis psikopati, yang berkontribusi pada kepribadian dan gaya kepemimpinannya yang berbeda. Mengenai konservatisme, Amira (2022) membahas kekhawatiran yang diungkapkan oleh para intelektual konservatif tentang Trump yang menodai merek konservatif dengan retorika dan gaya pemerintahannya yang otoriter-populis. Hubungan parasosial dengan Trump melalui media sosial telah dipelajari oleh (Paravati et al., 2020), menunjukkan bagaimana individu dengan ideologi politik yang sama merasakan hubungan pribadi dengannya, memengaruhi persepsi dan kesukaan mereka terhadapnya.

Dalam kebijakan luar negeri, White (2022) menganalisis pendekatan nasionalis Trump, menekankan janjinya untuk memprioritaskan kepentingan Amerika dengan mengganggu sistem internasional liberal demi mendukung

isolasionisme nasionalistis, membentuk keputusan dan interaksi kebijakan luar negerinya di panggung global. Sintesis referensi- referensi ini memberikan pemahaman komprehensif tentang kepribadian Donald Trump, gaya kepemimpinan, dampaknya terhadap konservatisme, pengaruh melalui media sosial, dan pendekatan terhadap kebijakan luar negeri, yang secara kolektif berkontribusi pada kepribadian kompleks yang mendefinisikan dirinya.

Idiosinkratik Donald Trump, yang mencakup karakteristik kepribadian dan gaya komunikasinya, telah berpengaruh signifikan terhadap cara dia berpolitik. Salah satu aspek utama dari idiosinkratiknya adalah penggunaan retorika yang tidak konvensional, yang berfungsi untuk membangun legitimasi dan menarik dukungan dari pemilih. Penelitian menunjukkan bahwa Trump mengadopsi gaya retorika baru yang berfokus pada legitimasi ide dan kebijakan yang ia usung, yang berbeda dari pendekatan tradisional yang lebih formal (Ross & Rivers, 2020). Gaya ini mencerminkan kepribadiannya yang cenderung langsung dan tidak terikat pada norma-norma politik yang ada, yang membuatnya lebih mudah diakses oleh segmen-segmen tertentu dalam masyarakat, terutama kelas pekerja (Clarke & Grieve, 2019). Penggunaan media sosial, khususnya Twitter, juga merupakan elemen penting dari idiosinkratik Trump dalam berpolitik.

Melalui Twitter, Trump mampu berkomunikasi secara langsung dengan publik, menghindari media tradisional yang sering kali dianggapnya bias. Penelitian menunjukkan bahwa Trump menggunakan Twitter sebagai alat strategis untuk menyebarkan pesan politiknya dan membangun identitas sebagai outsider politik yang dapat menyelamatkan Amerika (Pain & Chen, 2019). Gaya komunikasinya yang informal dan terkadang provokatif menarik perhatian

dan resonansi di kalangan pendukungnya, yang merasa terhubung dengan cara dia menyampaikan pandangannya (Rouabhia, 2023). Lebih lanjut, analisis terhadap bahasa dan gaya komunikasi Trump menunjukkan bahwa dia cenderung menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung, yang membuat pesannya lebih mudah dipahami oleh khalayak luas (Kayam, 2017). Hal ini kontras dengan gaya politik yang lebih kompleks dan akademis yang sering digunakan oleh politisi lain, seperti Hillary Clinton. Trump lebih fokus pada emosi dan ketakutan, menciptakan narasi yang membedakan dirinya dari lawan-lawan politiknya (Chen et al., 2019). Ini menciptakan suasana "kami versus mereka," yang sering kali digunakan untuk membangun dukungan di kalangan basis pemilihnya. Idiosinkratik Trump juga terlihat dalam cara dia menangani isu-isu sensitif, seperti imigrasi dan Islam. Dia sering menggunakan bahasa yang mengandung unsur ketakutan dan eksklusif, yang berfungsi untuk memperkuat pandangan populisnya dan membangun identitas politik yang kuat di kalangan pendukungnya (Khan et al., 2019).

Dengan demikian, karakteristik unik ini tidak hanya memengaruhi gaya komunikasinya, tetapi juga cara dia membentuk kebijakan dan merespons tantangan politik yang dihadapinya. Secara keseluruhan, idiosinkratik Donald Trump memainkan peran penting dalam membentuk karakteristiknya dalam berpolitik. Gaya komunikasinya yang unik, penggunaan media sosial, dan pendekatan terhadap isu-isu sensitif semuanya berkontribusi pada cara dia membangun dukungan dan legitimasi dalam arena politik yang semakin kompleks.

Gaya kepemimpinan Donald Trump dapat dicirikan melalui lensa sifat-sifat istimewa yang mencerminkan kepribadiannya dan lingkungan politik yang

dinavigasinya. Pendekatannya terhadap kepemimpinan sering digambarkan sebagai populis, ditandai dengan gaya komunikasi langsung dan konfrontatif yang beresonansi dengan segmen signifikan pemilih Amerika. Gaya ini bukan sekadar kekhasan pribadi tetapi lebih merupakan pilihan strategis yang selaras dengan tren populisme nasionalis yang lebih luas yang diamati dalam politik kontemporer, baik di Amerika Serikat maupun secara global (Gusterson, 2017). Salah satu ciri khas kepemimpinan Trump adalah penggunaan media sosial, khususnya Twitter, sebagai alat untuk komunikasi langsung dengan publik. Platform ini memungkinkannya untuk melewati saluran media tradisional, yang sering dikritiknya sebagai bias. Tweet-nya sering menggunakan nada provokatif dan informal, memperkuat narasi identitas Amerika yang homogen yang terancam oleh kekuatan eksternal (Kreis, 2017).

2.1.2 Idiosinkratik Xi Jinping

Saat ini, Presiden Tiongkok yakni Xi Jinping yang telah menjabat sejak tahun 2013 merupakan presiden Tiongkok generasi kelima. Xi Jinping juga merupakan presiden pertama Tiongkok yang terpilih untuk ketiga kalinya sekaligus mencabut persyaratan yang telah diterapkan sejak tahun 1980-an. Syarat pencalonan presiden Tiongkok berubah dari yang tadinya hanya dua periode menjadi tiga periode setelah melalui persidangan pada NPC (National People Congress of China). Keputusan tersebut didukung oleh 2.958 anggota kongres untuk menghapus jabatan presiden. Terpilihnya Xi Jinping sebagai presiden selama tiga kali berturut-turut menjadikan Xi Jinping menjadi pemimpin partai kuat setelah Mao Zedong yang telah berkuasa selama 27 tahun dan ada kemungkinan Xi dapat berkuasa lebih lama. Xi Jinping terpilih menjadi presiden

Tiongkok selama tiga periode setelah didukung 2.950 anggota Kongres Nasional Rakyat dalam pemilihan langsung terhadap presiden yang akan memimpin Tiongkok. (Veronica, 2023).

Xi Jinping merupakan presiden yang memiliki pengaruh kuat terkait kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh China dimana hal ini disebabkan oleh Xi Jinping yang menciptakan beragam inovasi dan menciptakan diplomasi dengan gaya baru. Pelaksanaan pemerintahan otoriter yang dilakukan oleh Xi Jinping merupakan sebuah “payung” bagi Tiongkok untuk menerapkan kebijakan luar negerinya. Strategi kebijakan luar negeri oleh Xi Jinping cukup berbeda apabila dibandingkan dengan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh presiden sebelum Xi Jinping. Sebelum Xi Jinping naik menjadi presiden, presiden Tiongkok menerapkan gaya diplomasi dengan berprinsip pada *“keep on a low-profile”*. Namun, pada saat Xi Jinping menjadi presiden Tiongkok, Xi Jinping menerapkan diplomasi yang lebih proaktif dan memiliki keinginan untuk mencapai prestasi dengan menerapkan konsep *“striving for achievement”*. Disamping itu, Xi Jinping merupakan seorang dengan memiliki kepribadian yang kuat sehingga diyakini mampu mengganti konstitusi Tiongkok dimana Xi Jinping mampu menghapuskan batas masa jabatan presiden Tiongkok adalah dua tahun. Kehadiran Xi Jinping sebagai presiden China mampu menghapuskan peraturan konstitusi dimana Xi Jinping yang telah memerintah Tiongkok sejak tahun 2013 masih memenangkan pemilu Tiongkok pada tahun 2023 (Zahra, 2023).

Xi Jinping dalam menerapkan kebijakan luar negerinya dipenuhi ambisi untuk membawa Tiongkok menuju negara yang lebih maju baik dalam bidang perekonomian dan militer. Hal ini ditunjukkan dari tindakan yang dilakukan oleh

Tiongkok untuk menguasai kawasan Laut China Selatan yang dilaksanakan dengan beragam aktivitas *high profile*. Walaupun kebijakan luar negeri yang dilaksanakan oleh Xi Jinping menuai pro dan kontra, namun Xi Jinping terus mengupayakan penyelesaian- penyelesaian dari sengketa kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan sehingga kepentingan nasional Tiongkok dapat terwujud. Sebagai presiden yang aktif dalam mendominasi forum-forum kerjasama di dalam kegiatan ekonomi, maka hal ini menyebabkan Xi Jinping mendapatkan pandangan sebagai pemimpin negara yang memiliki sifat agresif serta koersif. Namun, sifat Xi Jinping tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap Tiongkok terkait kepentingan nasionalnya di dalam berbagai aspek, khususnya pada perekonomian (Sesa, 2021).

Idiosinkratik Xi Jinping, yang mencakup latar belakang pribadi, pengalaman, dan gaya kepemimpinan, telah secara signifikan memengaruhi karakteristik politiknya dan kebijakan yang diambil selama masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT). Salah satu aspek utama dari idiosinkratiknya adalah penekanan pada ideologi dan narasi yang kuat, yang terlihat dalam upayanya untuk memposisikan "Mimpi Tiongkok" sebagai narasi utama negara. Mimpi Tiongkok, yang dicanangkan sebagai visi untuk kebangkitan nasional, mencerminkan ambisi Xi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat legitimasi pemerintahannya Gering (2023)Mazuelos, 2022). Dengan mengaitkan kebijakan dan program dengan narasi ini, Xi berusaha untuk menciptakan identitas kolektif di antara rakyat Tiongkok dan memperkuat dukungan terhadap kepemimpinannya. Pengalaman masa kecil Xi selama Revolusi Kebudayaan juga membentuk pandangannya terhadap kekuasaan dan

kepemimpinan. Pengalaman ini menanamkan dalam dirinya pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kontrol politik dan stabilitas sosial, yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambilnya, seperti kampanye anti-korupsi yang luas dan penegakan ketat terhadap kebebasan sipil (Torigian, 2018; Zhu et al., 2016). Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan partai dari elemen-elemen yang dianggap korup, tetapi juga untuk memperkuat posisi Xi sebagai pemimpin yang berkomitmen pada integritas dan efisiensi pemerintahan (Zhu et al., 2016). Dalam konteks internasional, Xi Jinping juga menunjukkan idiosinkratik yang kuat melalui pendekatan "Striving for Achievement" dalam kebijakan luar negeri. Berbeda dengan pendekatan "Keeping a Low Profile" yang diadopsi oleh pendahulunya, Xi lebih agresif dalam mempromosikan kepentingan Tiongkok di panggung global, termasuk melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) (Yan, 2014; Khan, 2024). Pendekatan ini mencerminkan keinginannya untuk mengubah posisi Tiongkok dari negara yang relatif pasif menjadi kekuatan global yang dominan, yang juga berfungsi untuk memperkuat legitimasi domestiknya dengan menunjukkan bahwa Tiongkok sedang bangkit di panggung dunia (Zeng, 2019).

Gaya komunikasi Xi juga mencerminkan idiosinkratiknya. Dia sering menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung, serta mengandalkan simbolisme yang kuat untuk menyampaikan pesan-pesannya. Ini terlihat dalam penggunaan istilah-istilah seperti "Empat Komprehensif" dan "Modernisasi Kapasitas Pemerintahan," yang tidak hanya berfungsi sebagai slogan politik tetapi juga sebagai alat untuk membangun narasi yang mendukung kebijakan-kebijakannya (Bernot & Trevaskes, 2022; Guo, 2020). Dengan cara ini, Xi

menciptakan citra dirinya sebagai pemimpin yang visioner dan pragmatis, yang mampu membawa Tiongkok menuju masa depan yang lebih baik. Secara keseluruhan, idiosinkratik Xi Jinping memainkan peran penting dalam membentuk karakteristik dan kebijakan politiknya. Melalui penekanan pada ideologi, pengalaman pribadi, dan gaya komunikasi yang khas, Xi telah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan dan membentuk arah politik Tiongkok dalam konteks domestik dan internasional.

2.2 Komparasi Hubungan AS-China di Bawah Pemerintahan yang Berbeda

2.2.1 Hubungan AS - China pada masa pemerintahan Obama

Sebagai komparasi, penulis mengambil contoh perbandingan hubungan bilateral AS-China pada masa pemerintahan Obama (2009-2017). Pada masa pemerintahan sebelum Trump, terdapat perbedaan signifikan dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pemerintahan Obama menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati dan berupaya memperkuat hubungan dengan Tiongkok. Meskipun ada perbedaan pendapat dan persaingan, Obama menekankan pentingnya hubungan AS- Tiongkok (Wei, 2014). Obama bahkan mendukung perintah eksekutif terkait Tiongkok dengan syarat tindakan legislatif tidak dimasukkan dalam pertimbangan (Wei, 2014).

Selain itu, kerja sama antara AS dan Tiongkok di bidang energi dan perubahan iklim juga menjadi fokus, seperti terlihat dalam pernyataan bersama presiden Tiongkok dan AS pada November 2014 (Andrews-Speed & Shi, 2015). Kerja sama ini menunjukkan potensi dukungan AS terhadap Tiongkok, mengingat peran penting kedua negara dalam konsumsi energi global dan emisi CO₂

(Andrews-Speed & Shi, 2015). Pada masa pemerintahan Obama, upaya dilakukan untuk meningkatkan hubungan bilateral dan menekankan pentingnya kerja sama dalam berbagai isu global. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hubungan AS-Tiongkok pada masa pemerintahan Obama lebih condong ke arah kerja sama dan dialog, sekaligus mengakui adanya perbedaan pendapat dan persaingan antar kedua negara.

Gaya kepemimpinan Xi Jinping dapat dianalisis melalui sudut pandang ciri-ciri khas yang mencerminkan pendekatannya yang unik terhadap tata kelola, ideologi, dan hubungan internasional. Masa jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) ditandai oleh konsolidasi kekuasaan yang signifikan, penekanan kuat pada kemurnian ideologis, dan visi strategis untuk peran Tiongkok di panggung global. Sintesis ciri-ciri dan strategi ini menggambarkan seorang pemimpin yang berfokus pada stabilitas domestik dan pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun Tiongkok sebagai kekuatan global yang tangguh. Salah satu aspek kepemimpinan Xi yang paling menonjol adalah penekanannya pada kontrol ideologis dan promosi "Mimpi Tiongkok," yang berfungsi sebagai narasi utama untuk peremajaan dan persatuan nasional. Xi telah memposisikan dirinya sebagai arsitek utama narasi ini, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa bangga nasional dan identitas kolektif di antara penduduk Tiongkok (Gering, 2023). Pendekatannya mencerminkan kembalinya gaya pemerintahan yang lebih tersentralisasi dan otoriter, yang mengingatkan pada periode sebelumnya dalam sejarah Tiongkok, di mana visi ideologis pemimpin adalah yang terpenting (Xu et al., 2022). Fokus ideologis ini terbukti dalam upaya PKT untuk mempertahankan legitimasi melalui kontrol ketat atas informasi dan

promosi narasi negara, khususnya dalam konteks tata kelola dan media digital (Xu et al., 2022; Xu & Yu, 2022).

2.2.2 Hubungan AS - China pada masa Pemerintahan Trump

Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada masa pemerintahan Trump ditandai dengan ketegangan dan perubahan kebijakan yang signifikan. Pemerintahan Trump mengadopsi pendekatan yang lebih konfrontatif terhadap Tiongkok, menekankan persaingan strategis dan menantang Tiongkok di berbagai bidang. Pergeseran ini terlihat dari perang dagang yang diprakarsai Trump melalui penerapan tarif terhadap barang-barang Tiongkok (Kapustina et al., 2020). Perang dagang, yang dimulai secara resmi pada tanggal 23 Maret 2018, ketika Trump menandatangani "Memorandum Presiden yang Menargetkan Agresi Ekonomi Tiongkok" dan memberlakukan tarif pada baja dan aluminium, merupakan aspek utama dari memburuknya hubungan antara kedua negara (Kapustina et al., 2020).

Selain itu, pemerintahan Trump berfokus pada isu-isu seperti keamanan siber dan teknologi, yang menyebabkan semakin meningkatnya ketegangan di sektor-sektor ini (Huda & Fadhat, 2022). Selain itu, pemerintahan Trump juga mengambil sikap tegas terhadap Taiwan, memihak Taipei sebagai respons terhadap apa yang dianggap sebagai tanggung jawab Beijing karena memperburuk hubungan lintas selat (Chen, 2019). Langkah ini menunjukkan perubahan dari pendekatan pemerintahan sebelumnya terhadap kebijakan Satu Tiongkok. Kebijakan pemerintahan Trump ditandai dengan fokus pada proteksionisme dan menantang pengaruh Tiongkok yang semakin besar, khususnya dalam konteks inisiatif seperti Inisiatif Sabuk dan Jalan (Blanchard, 2021).

Pandemi COVID-19 semakin memperburuk hubungan AS- Tiongkok, dimana Trump dan pemerintahannya menggunakan retorika yang menyalahkan Tiongkok atas penyebaran virus tersebut (Saltzman, 2023). Sentimen anti-Tiongkok ini diperburuk oleh pandemi ini, sehingga meningkatkan ketegangan dan narasi yang menjadikan Tiongkok sebagai kambing hitam atas krisis kesehatan global. Secara keseluruhan, pendekatan pemerintahan Trump terhadap Tiongkok ditentukan oleh pergeseran ke arah sikap yang lebih kompetitif dan konfrontatif, yang berdampak pada berbagai aspek hubungan bilateral.

2.2.3 Perbedaan Utama dalam Kegagalan Pemerintahan

Dalam perbandingan, pemerintahan sebelum Trump, seperti pemerintahan Obama, menunjukkan pendekatan yang lebih hati-hati dan berusaha memperkuat hubungan dengan Tiongkok. Obama bahkan mendukung perintah eksekutif terkait Tiongkok dengan syarat Tindakan legislatif dikecualikan dari pertimbangan (Wei, 2014). Kerja sama antara AS dan Tiongkok dalam bidang energi dan perubahan iklim juga menjadi fokus, menunjukkan potensi dukungan AS terhadap Tiongkok (Andrews-Speed & Shi, 2015). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hubungan AS-Tiongkok selama pemerintahan Obama cenderung lebih ke arah kerja sama dan dialog, sambil mengakui adanya perbedaan pendapat dan persaingan antara kedua negara.

Pada masa pemerintahan Trump, hubungan antara Amerika Serikat dan China mengalami peningkatan ketegangan, terutama dalam konteks diplomasi digital melalui platform seperti Twitter. Kebijakan Trump yang lebih konfrontatif dan retorika yang keras terhadap China melalui media sosial, termasuk Twitter, telah memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara Ba et al.

(2022). Sebaliknya, pada masa pemerintahan sebelumnya, seperti di bawah pemerintahan Obama, hubungan antara AS dan China cenderung lebih kooperatif dan dialogis, dengan penekanan pada pentingnya kerja sama global (Wei, 2014). Perbedaan pendekatan ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam hubungan bilateral antara kedua negara selama periode yang bersangkutan.

2.3 Dominasi Twitter dalam Media Sosial

2.3.1 Sejarah dan Perkembangan Twitter

Twitter telah mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan perkembangan teknologi informasi sejak awal didirikannya di tahun 2006. Sejarah perkembangan Twitter tidak hanya terbatas pada platform media sosial itu sendiri, tetapi juga mencerminkan bagaimana teknologi informasi telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang sejarah dan budaya. Sebagai contoh, penelitian tentang sejarah perkembangan makanan Indonesia dari abad ke-10 hingga masa pendudukan Jepang menunjukkan bagaimana penelitian sejarah dapat mengungkap aspek kultural dan historis yang terkait dengan makanan Santosa & Irawan (2023). Selain itu, dalam konteks sastra, Twitter juga telah menjadi wadah bagi perkembangan narasi sastra terkait dengan peristiwa sejarah, seperti gugur Irian dan hegemoni Jepang di Indonesia. Melalui narasi sastra, nilai-nilai sejarah dan pengalaman masa lalu dapat diungkap dan disebarluaskan melalui platform digital seperti Twitter (Wargiati et al., 2021). Pendidikan juga memainkan peran penting dalam sejarah dan perkembangan Twitter.

Pendidikan sejarah untuk kehidupan abad ke-21 menekankan pentingnya perubahan dalam tujuan, materi, proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran pendidikan sejarah (Hasan, 2019). Selain itu, pemahaman sejarah statistika juga menjadi relevan dalam konteks pembelajaran matematika di era modern, menunjukkan bagaimana sejarah dapat memberikan wawasan yang berharga dalam disiplin ilmu lain (Listiati, 2022). Penerapan kemahiran pemikiran sejarah dalam pendidikan sejarah juga menjadi fokus penting dalam mengembangkan literasi sejarah mahasiswa. Melalui penerapan kemahiran pemikiran sejarah, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap konteks sejarah dan mengembangkan keterampilan analisis yang mendalam terkait dengan peristiwa sejarah (Kaviza, 2021).

Dengan demikian, sejarah dan perkembangan Twitter hingga saat ini tidak hanya mencakup evolusi platform media sosial itu sendiri, tetapi juga mencerminkan bagaimana Twitter telah menjadi bagian integral dari berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang sejarah, budaya, dan pendidikan. Melalui penelitian dan pengembangan dalam berbagai disiplin ilmu, Twitter terus bertransformasi sebagai alat yang memengaruhi cara kita memahami, menyebarkan, dan menganalisis informasi dalam konteks sejarah dan kehidupan modern.

Twitter telah berkembang menjadi alat politik yang signifikan, bukan sekadar platform media sosial, sejak awal kemunculannya dalam konteks politik global dan lokal. Sejak gejolak politik di Timur Tengah yang dikenal sebagai Arab Spring, Twitter telah menunjukkan kemampuannya untuk menggerakkan massa dan memfasilitasi diskusi politik yang mendalam (Wibowo & Mirawati, 2013).

Penggunaan Twitter dalam konteks politik tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga berfungsi sebagai arena untuk mobilisasi sosial dan pengaruh terhadap agenda media

Di Indonesia, fenomena ini semakin terlihat dengan meningkatnya keterlibatan aktor politik dalam menggunakan Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Anies Baswedan, misalnya, memanfaatkan Twitter untuk menyampaikan janji politik dan perkembangan programnya, yang menunjukkan bagaimana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keterlibatan publik dalam politik. Selain itu, penggunaan buzzer politik yang mulai marak sejak pemilu 2014 menunjukkan bahwa Twitter telah menjadi alat strategis dalam kampanye politik, di mana buzzer berperan dalam mempromosikan kandidat dan isu- isu tertentu (Felicia & Loisa, 2019). Lebih jauh lagi, Twitter berfungsi sebagai ruang publik di mana diskusi politik dapat berlangsung tanpa batasan yang sering kali ada di media tradisional. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam diskusi politik di Twitter dapat dianggap sebagai praktik politik daring yang penting dalam proses demokratisasi (Setianto, 2020). Dalam konteks ini, Twitter tidak hanya menjadi platform untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga sebagai alat untuk membangun solidaritas dan gerakan sosial, seperti yang terlihat dalam kampanye antikorupsi yang melibatkan generasi muda. Dengan demikian, Twitter telah bertransformasi menjadi alat politik yang esensial, di mana aktor politik dan masyarakat dapat berinteraksi, berdebat, dan memobilisasi dukungan untuk isu-isu yang penting. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Twitter lebih dari sekadar media sosial; ia telah menjadi bagian integral dari lanskap politik modern, memberikan suara kepada individu dan

kelompok yang sebelumnya mungkin tidak memiliki platform untuk menyuarakan pendapat mereka (Anshari, 2013).

2.3.2 Dominasi Twitter dalam Media Sosial

Untuk mengetahui dominasi Twitter dalam dunia Media Sosial yang terus berkembang, perlu diketahui efektivitas perannya dalam menyebarkan informasi serta dampaknya dalam penggunaan masyarakat. Twitter beroperasi sebagai layanan mikroblog yang memungkinkan pengguna menyampaikan pesan dalam 280 karakter, yang memfasilitasi komunikasi cepat dan berbagai diskusi (Nudiati, 2023). Keringkasan ini memungkinkan Twitter berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk ekspresi pribadi dan komunikasi massa, memposisikannya sebagai saluran pilihan untuk distribusi berita dan pembaruan waktu nyata. Salah satu aspek signifikan dari dominasi Twitter adalah pemanfaatannya di berbagai bidang profesional, termasuk akademisi dan jurnanisme. Para peneliti telah menyoroti bahwa para akademisi terutama menggunakan Twitter untuk berkomunikasi dengan kolega dan menyebarluaskan penelitian yang ditinjau sejawat, yang secara efektif menjembatani kesenjangan antara akademisi dan wacana publik (Collins et al., 2016). Platform ini juga mendukung praktik jurnalistik, di mana para profesional media terlibat dengan Twitter sebagai sumber berita terkini yang dapat diandalkan, membantu membentuk narasi publik seputar peristiwa yang sedang berlangsung (Mansour, 2016).

Kapasitas untuk keterlibatan dan berbagi informasi ini menggarisbawahi peran penting Twitter dalam dinamika komunikasi kontemporer. Lebih jauh lagi, pengaruh Twitter melampaui sekadar komunikasi; Twitter membentuk perilaku konsumen dan opini publik secara signifikan. Bukti menunjukkan bahwa

sekitar 40% pengguna Twitter telah melakukan pembelian yang dipengaruhi oleh konten yang dilihat di platform tersebut (Yang, 2022). Oleh karena itu, pemasar semakin mengakui Twitter sebagai komponen penting dari strategi periklanan mereka, memanfaatkannya untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan membina hubungan pelanggan. Sifat langsung dan personal dari tweet membuat platform tersebut sangat efektif untuk menargetkan konsumen potensial dan menanggapi pertanyaan pelanggan secara langsung (Wilkinson et al., 2015). Hal ini menyoroti fungsi ganda Twitter sebagai platform sosial dan alat pemasaran yang penting, yang memperkuat relevansi dan dampaknya di berbagai bidang. Twitter juga berfungsi sebagai platform yang ampuh untuk aktivisme dan advokasi. Struktur platform ini memungkinkan pengguna untuk memobilisasi dukungan bagi berbagai gerakan sosial, yang menunjukkan kapasitasnya untuk memengaruhi hasil politik dan sosial. Berbagai penelitian telah mendokumentasikan bagaimana pengguna memanfaatkan Twitter untuk berdiskusi dan berorganisasi seputar isu-isu politik yang kontroversial, yang secara efektif mengubahnya menjadi ruang publik untuk aktivisme (Barberá & Zeitzoff, 2017; Konnelly, 2015). Mengingat kapasitasnya untuk memperkuat suara kaum terpinggirkan dan mendukung aksi kolektif, peran Twitter dalam wacana sosial tidak dapat dilebih-lebihkan.

Namun, penting untuk mengakui tantangan yang datang dengan pengaruh Twitter yang meluas, khususnya terkait penyebaran informasi yang salah dan keberadaan akun bot (Haidermota, 2018). Isu-isu ini memperumit lanskap wacana digital, yang mengharuskan pemeriksaan kritis tentang bagaimana informasi dikelola dan dibagikan di platform tersebut. Meskipun menghadapi tantangan ini,

peran formatif Twitter dalam membentuk percakapan publik dan memfasilitasi penyebaran pesan yang cepat menekankan dominasinya dalam media sosial. Sebagai kesimpulan, sementara berbagai platform hidup berdampingan dalam lanskap media sosial yang lebih luas, fitur-fitur unik Twitter, seperti gaya komunikasinya yang peka waktu, relevansi profesional, potensi pengaruh konsumen, dan peran dalam aktivisme, secara kolektif berkontribusi pada statusnya sebagai kekuatan dominan di media sosial. Karena pengguna terus terlibat dengan platform tersebut untuk tujuan pribadi dan profesional, dan karena merek dan organisasi memanfaatkan kemampuannya untuk penjangkauan dan pemasaran, pengaruh Twitter dalam ekosistem komunikasi digital tampaknya tidak hanya berkelanjutan tetapi juga penting.

2.4 Twitter dan Diplomasi Publik

Twitter telah menjadi platform penting dalam praktik diplomasi publik, memungkinkan negara dan pemimpin dunia untuk berinteraksi langsung dengan publik dan mengkomunikasikan kebijakan luar negeri mereka. Dalam konteks ini, Twitter tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun dialog, membentuk opini publik, dan merespons isu-isu global secara cepat. Diplomasi publik melalui Twitter, atau yang sering disebut sebagai twiplomacy, memungkinkan aktor negara untuk mengatasi tantangan komunikasi yang dihadapi dalam era digital, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan luas. Salah satu aspek penting dari twiplomacy adalah kemampuannya untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Melalui penggunaan hashtag dan cuitan yang menarik, pemimpin

negara dapat menarik perhatian publik global dan menciptakan narasi yang mendukung kebijakan mereka (Caglayan & Ozel, 2021).

Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin dunia, termasuk presiden dan menteri luar negeri, semakin aktif menggunakan Twitter untuk mempromosikan agenda diplomatik mereka, berinteraksi dengan masyarakat, dan merespons kritik (Ifra, 2023). Dengan demikian, Twitter menjadi alat yang efektif dalam membangun citra positif negara di mata internasional. Namun, penggunaan Twitter dalam diplomasi publik juga menghadapi tantangan. Konten yang diposting di platform ini sering kali dapat memicu kontroversi dan polarisasi, yang dapat mengganggu hubungan diplomatik yang sudah ada. Misalnya, cuitan yang dianggap provokatif atau tidak sensitif dapat menyebabkan ketegangan antara negara-negara (Leslie & Roselle, 2022). Oleh karena itu, penting bagi aktor negara untuk mempertimbangkan dampak dari setiap pesan yang mereka sampaikan melalui Twitter, serta bagaimana pesan tersebut dapat diterima oleh audiens yang berbeda.

2.4.1 Aktor Negara dalam Twiplomacy

Aktor negara, termasuk presiden, semakin memanfaatkan Twitter sebagai alat diplomatik. Hal ini belakangan sering disebut sebagai "Twiplomacy." Pendekatan diplomasi digital ini memungkinkan politisi untuk terlibat dengan audiens asing dan domestik secara langsung, membangun interaksi dan membahas berbagai isu. Misalnya, aktor negara otoriter seperti Tiongkok telah secara aktif menggunakan platform media sosial global seperti Twitter untuk memajukan narasi pilihan mereka dengan publik asing, terlibat dalam apa yang dapat disebut sebagai "Twiplomacy" untuk menentang narasi secara global atas isu-isu

kontroversial Zeng (2023). Dalam kasus mantan Presiden Donald Trump, kehadirannya di Twitter merupakan elemen utama dari strategi komunikasinya, membentuk opini publik dan melibatkan audiens yang luas. Tweet Trump berperan penting dalam melakukan diplomasi publik dan menjangkau audiens global, yang mencerminkan munculnya "diplomasi Tagar" atau "diplomasi Twitter" sebagai alat bagi para aktor kebijakan internasional untuk melakukan diplomasi publik secara efektif (Graham, 2020). Cuitan Trump tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat strategis untuk menjalankan diplomasi publik dan melibatkan khalayak di seluruh dunia (Blankenship, 2019).

Selain itu, penggunaan Twitter dalam diplomasi telah menjadi aspek penting dalam kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Aktor negara, termasuk diplomat dan kepala negara, telah memanfaatkan Twitter untuk menjalankan diplomasi publik, melibatkan khalayak global, dan membentuk narasi tentang berbagai isu. Bentuk diplomasi digital ini, yang dikenal sebagai "Twiplomacy," merupakan persimpangan antara diplomasi tradisional, diplomasi digital, dan media sosial, yang menyoroti sifat praktik diplomatik yang terus berkembang di era digital (Cotton & Boulanger, 2023). Sebagai kesimpulan, pemanfaatan Twitter oleh aktor negara, termasuk presiden, untuk tujuan diplomatik telah menjadi semakin lazim, membentuk wacana publik, melibatkan khalayak global, dan memengaruhi hubungan internasional. Konsep "Twiplomacy" menggarisbawahi pentingnya platform media sosial seperti Twitter dalam praktik diplomatik dan strategi komunikasi modern.

Dalam konteks "Twiplomacy," aktor negara yang terlibat umumnya mencakup pemimpin dan pejabat tinggi dari berbagai negara yang menggunakan

Twitter sebagai alat untuk berkomunikasi dan berdiplomasi. Berikut adalah beberapa contoh aktor negara yang sering terlibat dalam Twiplomacy seperti presiden, perdana menteri, menteri luar negeri, dan organisasi internasional. Selain Donald Trump, aktor lain yang menggunakan Twiplomacy adalah Justin Trudeau selaku perdana menteri Kanada. Justin Trudeau menggunakan Twitter untuk berbagi informasi penting dan berinteraksi dengan warga, terutama selama krisis seperti COVID-19. "For the latest updates on COVID-19, please follow @CPHO_Canada and @GovCanHealth. @PattyHajdu is also providing important information on Canada's response to the virus." (11 Maret 2020). Tweet itu menunjukkan pendekatan proaktif oleh seorang pemimpin dunia untuk memastikan bahwa warga negara memiliki akses ke informasi yang akurat dan tepat waktu selama krisis kesehatan masyarakat yang kritis. Hal ini menyoroti peran media sosial sebagai alat komunikasi dan keterlibatan publik.

Table 1 Results from COVID-19 Twitter search

Name, G7 Member Nation ^a	Followers (million)	Viral tweets ^b	Theme: n (%)—Of which contained government weblinks: n (%)	Top tweet ^c : likes, retweets and comments (thousand)	Viral videos ^d , n; total views (million)	Non-English language tweets: n (%)
Justin Trudeau	4.7	61	Informative: 61 (100.0)—27 (44.3)	61.8, 10.7, 4.0	N/A	French: 1 (1.6)
Emmanuel Macron	4.6	24	Informative: 15 (62.5)—2 (13.3) Morale-boosting: 9 (37.5)	134.1, 29.9, 4.2	3; 2.8	French: 22 (91.7)
Giuseppe Conte	0.4	8	Informative: 7 (87.5)—5 (71.4) Morale-boosting: 1 (12.5)	16.4, 2.8, 1.4	2; 0.2	Italian: 8 (100.0)
Shinzo Abe	1.7	20	Informative: 19 (95.0)—1 (5.2) Morale-boosting: 1 (5.0)	27.0, 66.7, 4.9	1; 0.9	Japanese: 20 (100.0)
Boris Johnson	1.6	16	Informative: 15 (93.8)—8 (53.3) Morale-boosting: 1 (6.3)	9.5, 1.7, 1.4	6; 3.1	N/A
Donald Trump	71.4	51	Informative: 32 (62.7)—3 (9.4) Morale-boosting: 5 (9.8) Political: 14 (27.5)	289.3, 81.3, 78.4	2; 4.1	N/A
Charles Michel	1.1	2	Informative: 2 (100.0)	0.5, 0.3, 0.1	N/A	N/A
Ursula von der Leyen	0.2	21	Informative: 19 (90.5)—2 (10.5) Morale-boosting: 2 (9.5)	20.0, 6.7, 2.9	5; 1.3	French: 1 (4.8); German: 1 (4.8); Italian: 2 (9.5)
Total	85.7	203	Informative: 168 (82.8)—48 (28.6) Morale-boosting: 19 (9.4) Political: 14 (6.9)	558.6, 200.1, 97.3	19; 12.4	French: 24 (11.8); German: 2 (1.0); Italian: 10 (4.9); Japanese: 20 (9.9)

^aG7 Members' verified Twitter accounts ('handles') were as follows: @JustinTrudeau; @EmmanuelMacron; @GiuseppeConteIT; @AbeShinzo; @BorisJohnson; @realDonaldTrump; @eucopresident; @vonderleyen; and no active Twitter account was identified for Angela Merkel.

^bViral tweet defined as attracting at least 500 likes on the subject of 'COVID-19' or 'coronavirus'.

^cTop tweet defined as that with the highest number of likes.

^dAll viral Twitter videos were embedded within viral informative tweets. All figures reported are accurate to 1 decimal place.

2.4.2 Diplomasi Digital di bawah kepemimpinan Trump

Diplomasi digital di bawah kepemimpinan Presiden Trump ditandai dengan penggunaan Twitter yang aktif dan kontroversial sebagai alat diplomatik. Gaya komunikasi Trump di Twitter, yang ditandai dengan kenegatifan, kemegahan, dan impulsif, konsisten selama masa jabatan kepresidenannya dan tidak dianggap konvensional untuk bahasa diplomatik Šimunjak & Caliandro (2019). Tweet-nya berperan penting dalam melakukan diplomasi publik, melibatkan khalayak global, dan membentuk opini publik tentang berbagai isu (Surowiec & Miles, 2020). Kehadiran Trump di Twitter merupakan elemen utama dari strategi komunikasinya, yang memungkinkannya untuk secara langsung berbicara kepada khalayak domestik dan internasional, yang mencerminkan munculnya "diplomasi Tagar" atau "diplomasi Twitter" sebagai alat bagi para pelaku kebijakan internasional untuk secara efektif melakukan diplomasi publik (Graham, 2020).

Pendekatan diplomasi digital Trump melalui Twitter merupakan bagian dari tren yang lebih luas dalam diplomasi modern, di mana platform media sosial memainkan peran penting dalam membentuk praktik diplomatik dan strategi komunikasi. Penggunaan Twitter oleh Presiden Trump menggambarkan sifat yang terus berkembang dari keterlibatan diplomatik di era digital, yang menyoroti persimpangan antara diplomasi tradisional, diplomasi digital, dan media sosial (Cotton & Boulanger, 2023). Meskipun ada kritik terhadap gaya komunikasinya, penggunaan Twitter oleh Trump sebagai alat diplomatik menunjukkan semakin pentingnya platform digital dalam melakukan diplomasi publik dan melibatkan khalayak global.